

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016- 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.2 Visi Misi Kepala Daerah

➤ VISI:

“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

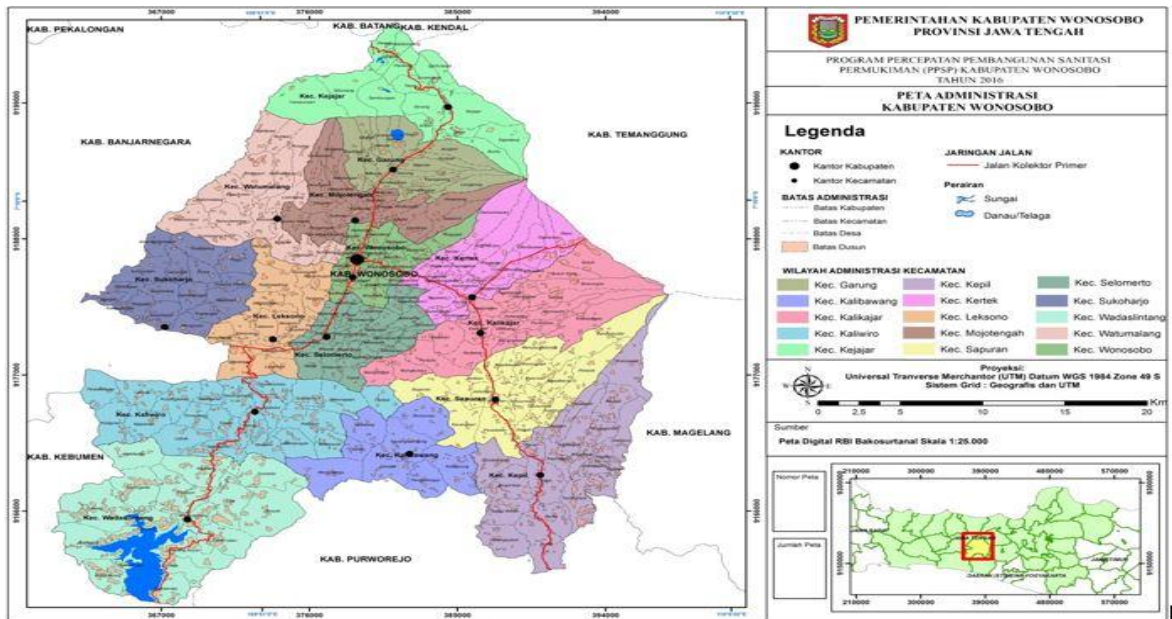
➤ MISI:

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas lapangan kerja;
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkualitas melalui program pendidikan dan kesehatan serta berprestasi di berbagai aspek kehidupan.
5. Mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang profesional, kepemimpinan daerah yang efektif, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

1.3 Gambaran Umum Daerah

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03% dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.



Gambar I.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo

(Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo)

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada $7^{\circ}11'13''$ dan $7^{\circ}36'40''$ garis Lintang Selatan (LS) serta $109^{\circ}43'19''$ dan $110^{\circ}04'40''$ garis Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

1.4 Kondisi Geografis Daerah

1.4.1 Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

Tabel I. 1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	19
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98.468	100,00	236	29	265

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2021

1.4.2 Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut.

Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 7 wilayah kemiringan, yaitu:

Tabel I.2.**Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo**

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
1.	0 - 2 %	1.052,263	Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek (1,04 % dari luas seluruh wilayah)
2.	2 - 5 %	22.969,500	Terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang (22,89 % dari luas seluruh wilayah)
3.	5 - 8 %	8.143,769	Tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang (8,11% dari luas seluruh wilayah)
4.	8 – 15 %	55.434,850	Semua kecamatan (55,2% dari luas seluruh wilayah)
5.	15 – 25 %	11.101,600	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo (11,06% dari luas seluruh wilayah)
6.	25 – 40 %	1.479,631	Kecamatan Kejajar, Garung dan Kalikajar (1,47% dari luas seluruh wilayah)
7.	>40 %	142.362	Kecamatan Kejajar (0,14% dari luas seluruh wilayah)

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2021

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor pariwisata, pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah longsor.

1.4.3 Struktur Geologi

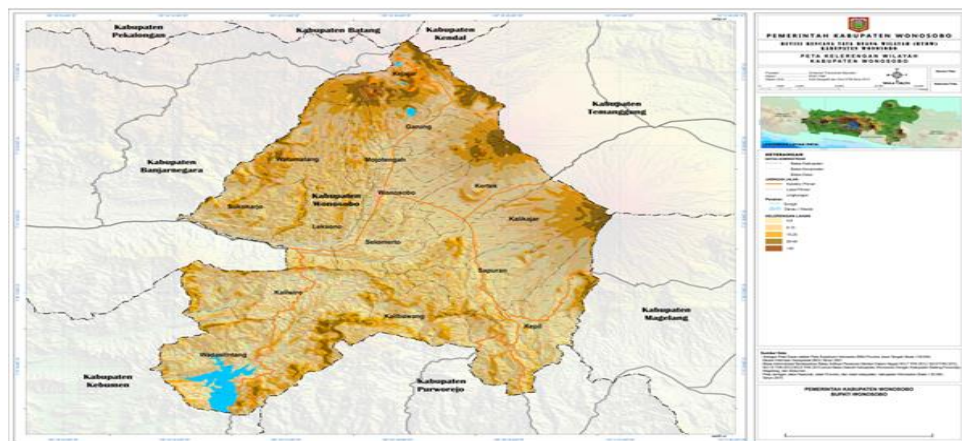
Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunungapi kuarter. Endapan gunungapi kuarter masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunungapi Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi).

Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang terbentuk oleh proses orogenesis dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada jaman Kuarter ($\pm 1,8$ juta tahun yang lain), rangkaian gunung api tersebut terus berlanjut dan bersambung dengan kompleks gunung api Dieng dan Rogojembangan. Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman *Pleistocene* yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Hulu Sungai Serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan dibatasi oleh Zone Patahan.

Kondisi Geologi yang membentuk wilayah Wonosobo menjadikan banyaknya aktifitas vulkanik yang dominan di Wonosobo. Salah satu bentuknya yaitu adanya Kawah yang banyak kita temui di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kawah ini juga digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kontrol energi vulkanik yang dominan juga berdampak terhadap tingkat kesuburan tanah yang berada di Wilayah Utara Kabupaten Wonosobo (Kec. Kejajar, Kec. Garung, Kec. Mojotengah, Kec. Watumalang, Kec. Kertek, Kec. Kalikajar, Kec. Sapuran, Kec. Wonosobo, Kec. Selomerto, sebagian Kec. Leksono dan Kec. Sukoharjo). Efeknya Kabupaten Wonosobo memiliki lahan yang subur untuk ditanami dengan tanaman sayur-sayuran maupun komoditas perkebunan. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, *Carica papaya* dan *Asparagus* dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas serta beberapa jenis tanaman yang membudidayakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih.

1.4.4 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar I.2.



Gambar I.2. Peta Topografi Kabupaten Wonosobo

(Sumber: RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031)

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial (aliran sungai). Bentuk bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunungapi material piroklastik. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 mdpl – 2250 mdpl dengan dominasi pada rentang 500 mdpl – 1000 mdpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3–26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu, Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunungapi kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunungapi muda Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 meliputi lahan sawah sebesar 14.887,7 Ha (14,38%) dan bukan lahan sawah 88.515,84 Ha (85,62%). Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, permukiman seluas 71.980,01 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

1.4.5 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar 898.307 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 459.146 jiwa dan penduduk perempuan 439.161 jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 10,35% atau 92.957 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat persentase 3,14 % atau 28.238 jiwa. Tabel 1.3-1.6 menjelaskan kondisi kependudukan/ demografii Kabupaten Wonosobo per Desember Tahun 2020.

Tabel I.3.**Data Penduduk Wonosobo Tahun 2020****Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wadaslintang	31.717	30.929	62.646	6,97
2	Kepil	33.973	32.453	66.426	7,39
3	Sapuran	32.194	30.550	62.744	6,98
4	Kaliwiro	27.514	26.813	54.327	6,05
5	Leksono	23.788	23.410	47.198	5,25
6	Selomerto	27.649	27.065	54.714	6,09
7	Kalikajar	37.376	35.258	72.634	8,09
8	Kertek	46.912	45.013	91.925	10,23
9	Wonosobo	46.964	45.993	92.957	10,35
10	Watumalang	29.510	28.064	57.574	6,41
11	Mojotengah	34.201	31.832	66.033	7,35
12	Garung	29.919	27.906	57.825	6,44
13	Kejajar	24.263	22.591	46.854	5,22
14	Sukoharjo	18.621	17.591	36.212	4,03
15	Kalibawang	14.545	13.693	28.238	3,14
	Jumlah	459.146	439.161	898.307	100

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Tabel I.4. Data Penduduk Berdasarkan Umur di**Kabupaten Wonosobo Tahun 2020**

No.	Rentang Umur	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	00 - 4 tahun	32.809	29.969	62.778
2	05 - 9 tahun	37.020	34.855	71.875
3	10 - 14 tahun	36.624	34.896	71.520
4	15 - 19 tahun	32.540	31.608	64.148

No.	Rentang Umur	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
5	20 - 24 tahun	37.957	35.770	73.727
6	25 - 29 tahun	37.742	35.064	72.806
7	30 - 34 tahun	34.703	31.508	66.211
8	35 - 39 tahun	35.628	34.045	69.673
9	40 - 44 tahun	33.441	33.531	66.972
10	45 - 49 tahun	31.149	31.475	62.624
11	50 - 54 tahun	29.171	29.925	59.096
12	55 - 59 tahun	24.797	24.390	49.187
13	60 - 64 tahun	20.726	20.373	41.099
14	65 - 69 tahun	15.179	13.165	28.344
15	70 - 74 tahun	8.479	8.469	16.948
16	75 tahun ke atas	11.181	10.118	21.299
	Jumlah	459.146	439.161	898.307

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Tabel I.5.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum Tidak Bekerja	214.824
2	Mengurus Rumah Tangga	152.578
3	Pelajar Mahasiswa	110.666
4	Pensiunan	3.743
5	Pegawai Negeri Sipil	6.937
6	Tentara Nasional Indonesia	324
7	Kepolisian RI	632
8	Perdagangan	9.879
9	Petani Pekebun	150.218
10	Peternak	339

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
11	Nelayan Perikanan	104
12	Industri	368
13	Konstruksi	162
14	Transportasi	1.175
15	Karyawan Swasta	42.375
16	Karyawan BUMN	813
17	Karyawan BUMD	501
18	Karyawan Honorer	1.823
19	Buruh Harian Lepas	48.767
20	Buruh Tani Perkebunan	35.416
21	Buruh Nelayan Perikanan	120
22	Buruh Peternakan	182
23	Pembantu Rumah Tangga	2.678
24	Tukang Cukur	124
25	Tukang Listrik	125
26	Tukang Batu	3.893
27	Tukang Kayu	2.210
28	Tukang Sol Sepatu	100
29	Tukang Las Pandai Besi	666
30	Tukang Jahit	1.263
31	Tukang Gigi	19
32	Penata Rias	98
33	Penata Busana	12
34	Penata Rambut	49
35	Mekanik	623
36	Seniman	91
37	Tabib	29
38	Paraji	72
39	Perancang Busana	12
40	Penterjemah	8
41	Imam Masjid	148
42	Pendeta	22

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
43	Pastor	5
44	Wartawan	31
45	Ustadz Mubaligh	277
46	Juru Masak	60
47	Promotor Acara	-
48	Anggota DPR RI	-
49	Anggota DPD	-
50	Anggota BPK	-
51	Presiden	-
52	Wakil Presiden	-
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	2
54	Anggota Kabinet Kementerian	-
55	Duta Besar	-
56	Gubernur	-
57	Wakil Gubernur	-
58	Bupati	1
59	Wakil Bupati	1
60	Walikota	-
61	Wakil Walikota	1
62	Anggota DPRD Provinsi	3
63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	23
64	Dosen	190
65	Guru	5.702
66	Pilot	1
67	Pengacara	12
68	Notaris	17
69	Arsitek	30
70	Akuntan	3
71	Konsultan	27
72	Dokter	138
73	Bidan	420
74	Perawat	665

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
75	Apoteker	43
76	Psikiater Psikolog	1
77	Penyiar Televisi	-
78	Penyiar Radio	12
79	Pelaut	102
80	Peneliti	11
81	Sopir	4.042
82	Pialang	21
83	Paranormal	15
84	Pedagang	19.417
85	Perangkat Desa	2.116
86	Kepala Desa	148
87	Biarawan Ti	17
88	Wiraswasta	70.520
89	Pekerjaan Lainnya	45
JUMLAH		898.307

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Tabel I.6.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Belum Sekolah	190.277
2	Tidak Tamat SD Sederajat	77.006
3	Tamat SD Sederajat	375.147
4	SLTP Sederajat	143.169
5	SLTA Sederajat	84.882
6	Diploma III	3.655
7	Akademi Diploma III/ Sarjana Muda	5.803
8	Diploma IV Strata I	17.317
9	Strata II	1.001
10	Strata III	50
JUMLAH		898.307

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

1.5 Kondisi Ekonomi

1.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Tabel I.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kebumen	22.434.948,76	24.068.988,49	25.997.227,76	27.944.041,19	28.010.813,00
Kabupaten Purworejo	15.013.872,35	16.155.396,44	17.416.243,42	18.672.840,35	18.637.129,25
Kabupaten Wonosobo	15.367.781,80	16.255.103,40	17.493.244,85	18.854.448,71	18.857.738,80
Kabupaten Magelang	26.232.349,05	28.183.854,01	30.339.465,47	32.490.800,51	32.454.720,09
Kabupaten Temanggung	17.548.930,01	18.807.712,01	20.254.482,86	21.657.397,07	21.557.948,69
Kota Magelang	7.023.900,08	7.606.070,53	8.201.360,23	8.809.839,93	8.721.968,47

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021

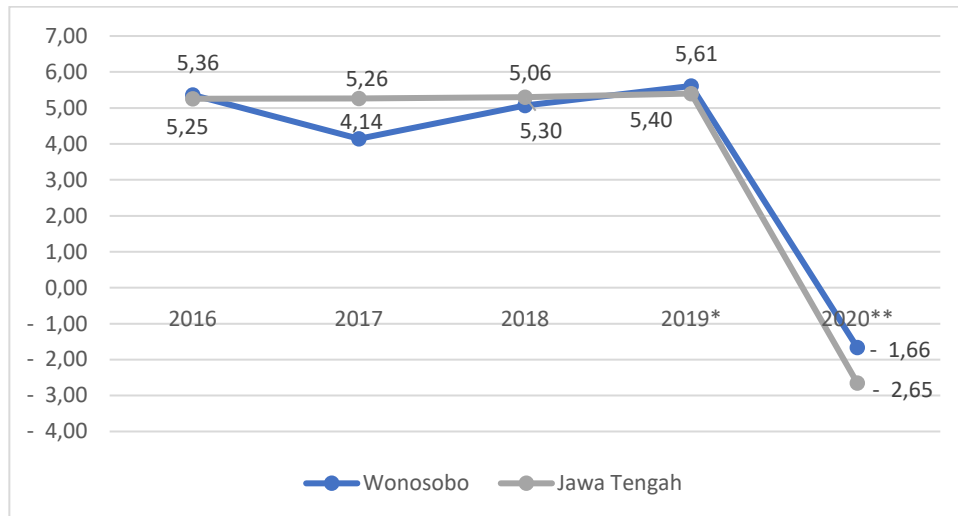
Tabel I.8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019**	2020
1	Kabupaten Magelang	19.882.244,24	20.937.301,01	22.074.995,90	23.253.154,32	22.861.470,84
2	Kota Magelang	5.521.525,54	5.820.532,00	6.145.869,75	6.472.539,51	6.314.047,34
3	Kabupaten Purworejo	11.421.552,22	12.028.190,37	12.668.117,97	13.360.774,12	13.132.491,61
4	Kabupaten Temanggung	13.116.363,64	13.754.614,81	14.452.019,21	15.214.058,87	14.890.753,23
5	Kabupaten Kebumen	16.923.719,54	17.792.465,13	18.773.833,50	19.825.062,62	19.526.363,35
6	Kabupaten Wonosobo	11.941.198,92	12.405.048,84	13.017.627,75	13.798.836,28	13.569.633,58

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021

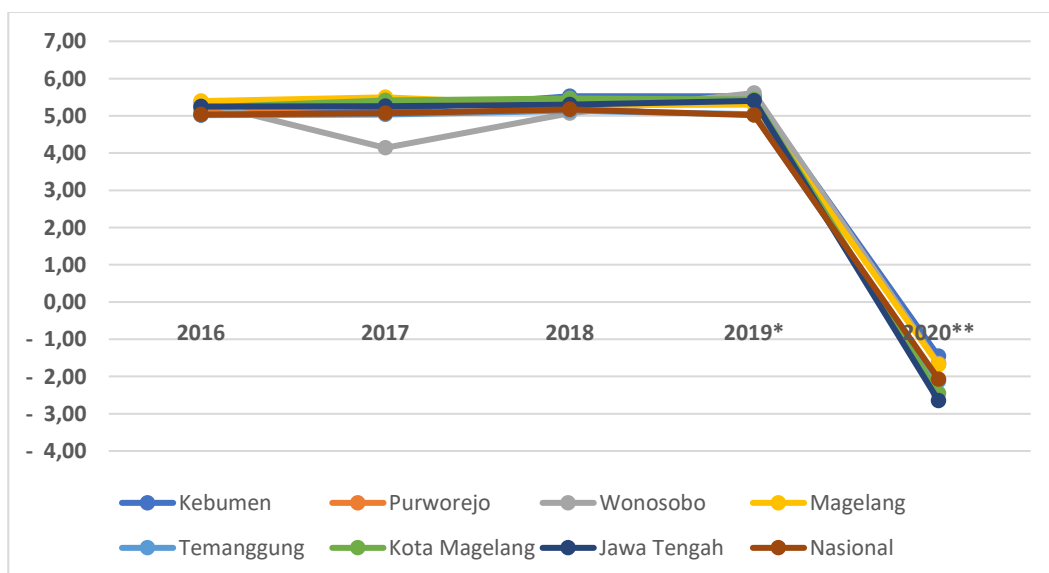
Pada Tahun 2020, PDRB tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Kedu senilai Rp32,45 triliun dicapai oleh Kabupaten Magelang, sedangkan terendah adalah Kota Magelang dengan nilai PDRB Rp8,7 triliun. Kabupaten Wonosobo berada di urutan keempat dengan nilai PDRB sebesar Rp18,857 triliun, tumbuh mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.



**Gambar I.3. Relevansi Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo
Dibandingkan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020**

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -1,66. Hal tersebut merupakan bagian dari dampak ekonomi selama masa pandemic Covid-19. Di sisi lain selama 5 tahun terakhir perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo relevan dengan capaian Provinsi Jateng, bahkan pada tahun 2019 dan 2020 laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wonosobo melebihi capaian Provinsi Jateng. Dengan demikian secara makro Kabupaten Wonosobo berkontribusi yang cukup signifikan terhadap kenaikan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar I.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu dibandingkan
Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota eks-karesidenan Kedu, Kondisi Ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 lebih baik dari kondisi provinsi dan nasional. Untuk melihat struktur perekonomian dan peranan masing-masing sektor menurut lapangan usaha di Kabupaten Wonosobo, dapat dilihat dalam tabel perkembangan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menurut lapangan usaha serta persen kontribusi masing-masing sektor dalam tabel berikut:

**Tabel I.9 PDRB Kabupaten Wonosobo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.284.092,70	5.462.719,21	5.859.464,15
B	Pertambangan dan Penggalan	162.897,14	185.204,85	19.879,92
C	Industri Pengolahan	3.082.820,44	3.353.650,85	3.437.892,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.761,18	6.017,73	6.055,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.527,45	18.992,87	19.887,95
F	Konstruksi	1.180.741,28	1.296.556,09	1.237.500,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.938.669,62	3.240.974,81	3.122.136,58
H	Transportasi dan Pergudangan	907.215,95	998.987,24	727.488,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	551.631,04	611.458,37	527.620,87
J	Informasi dan Komunikasi	223.460,22	263.388,54	299.564,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	570.158,31	617.027,27	609.535,38
L	Real Estate	266.297,73	290.267,53	290.176,84
M, N	Jasa Perusahaan	47.860,86	54.095,31	51.592,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	449.847,69	468.787,46	470.103,05
P	Jasa Pendidikan	1.142.078,75	1.247.966,62	1.263.336,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258.024,00	286.901,87	318.700,26
R, S, T, U	Jasa lainnya	404.160,49	451.452,09	423.846,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.493.244,85	18.854.448,71	18.857.783,80

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp5,85 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh 6,77 %, disusul sektor industri pengolahan dengan nilai Rp3,4 triliun atau tumbuh 2,45 %.

Tabel I.10. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2020

Kategori	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,21	28,97	31,07
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,98	1,02
C	Industri Pengolahan	17,62	17,79	18,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	6,75	6,88	6,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,80	17,19	16,56
H	Transportasi dan Pergudangan	5,19	5,30	3,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,15	3,24	2,80
J	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,40	1,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,27	3,23
L	Real Estate	1,52	1,54	1,54
M, N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	2,49	2,49
P	Jasa Pendidikan	6,53	6,62	6,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,52	1,69
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,31	2,39	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021

Empat sektor yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 31,07%, industri pengolahan sebesar 18,23%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,56% serta jasa pendidikan sebesar 6,70%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan tertinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan PDRB secara umum.

Tabel I.11. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)

Kategori	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,82	1,16	4,83
B	Pertambangan dan Penggalian	2,73	11,77	2,81
C	Industri Pengolahan	6,54	7,10	0,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,92	4,26	1,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	4,73	2,08
F	Konstruksi	6,87	7,28	-3,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,46	6,69	-4,14
H	Transportasi dan Pergudangan	7,02	8,17	-29,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	9,19	-13,52
J	Informasi dan Komunikasi	15,39	16,13	14,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,95	5,89	1,38
L	Real Estate	5,31	7,12	-0,48
M, N	Jasa Perusahaan	8,33	10,31	-6,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	2,73	-1,29
P	Jasa Pendidikan	7,33	7,70	-0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,50	7,66
R, S, T, U	Jasa lainnya	11,01	10,30	-6,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,06	5,61	-1,66

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021

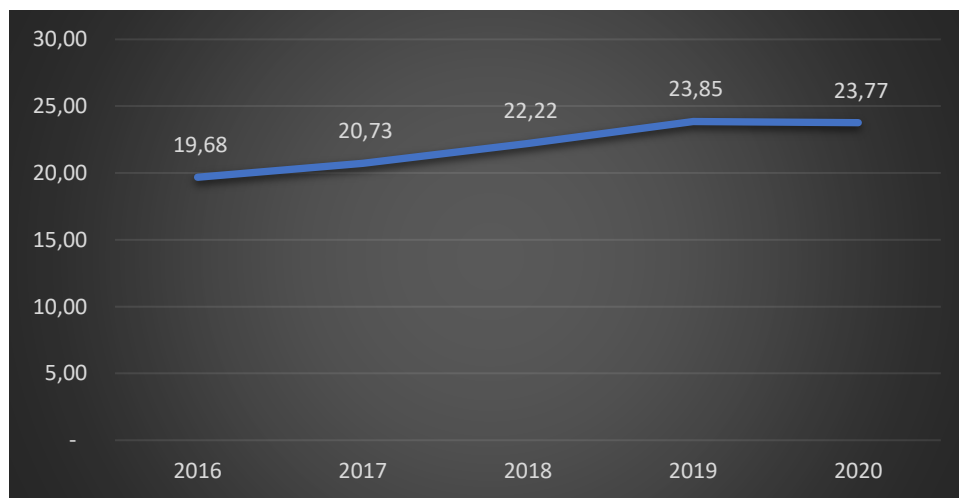
1.5.2 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Tabel I.12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Wonosobo 2016-2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	15 367 781.80	16 255 103.40	17 493 244.85	18 854 448.71	18 857 783.80
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	780,793	784,207	787,384	790,504	793,403
PDRB Perkapita	19.68	20.73	22.22	23.85	23.77

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021



**Gambar I.5. Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020**

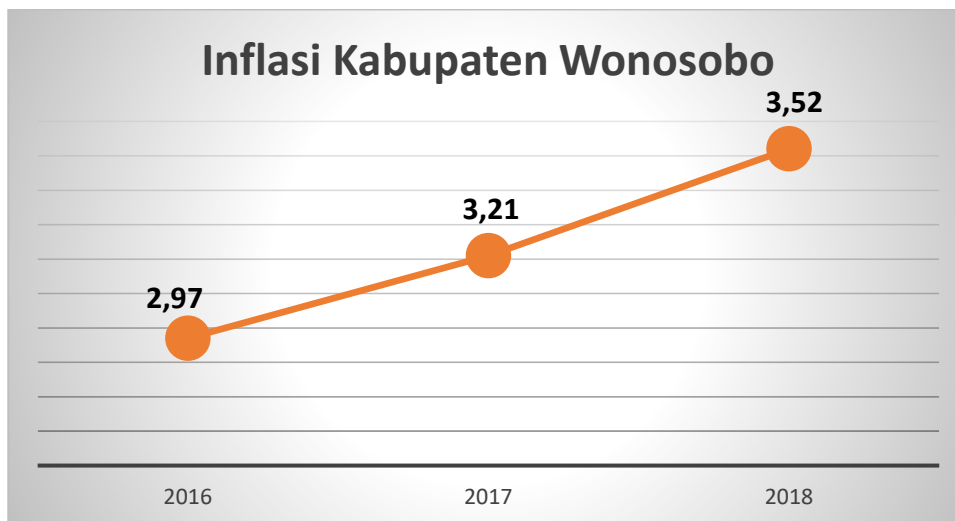
(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

PDRB perkapita pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08% meski tidak signifikan. Berbanding terbalik dengan kondisi PDRB perkapita tahun 2019 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Kenaikan PDRB perkapita pada kurun waktu 2016 s.d. 2019 dipengaruhi oleh menurunnya laju pertumbuhan penduduk yang selama 4 tahun terakhir rata-rata 2% per tahun. Disamping itu PDRB mengalami penurunan meskipun tidak mampu menunjukkan besarnya kesenjangan, namun angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

1.5.3 Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

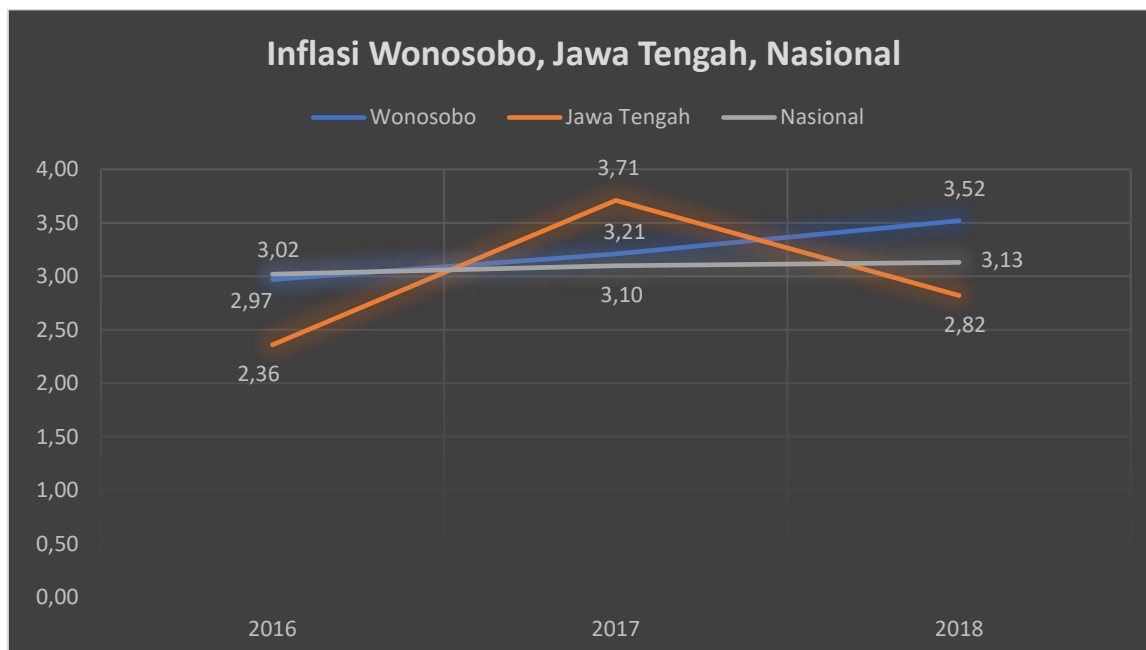
Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Wonosobo selama Tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada Gambar I.6.



Gambar I.6. Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo 2016-2018

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Laju inflasi di Kabupaten Wonosobo selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2018 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan laju inflasi pada tahun 2019-2020 tidak ditemukan angka dikarenakan tidak ada penghitungan inflasi pada tahun tersebut.



Gambar I.7. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2018

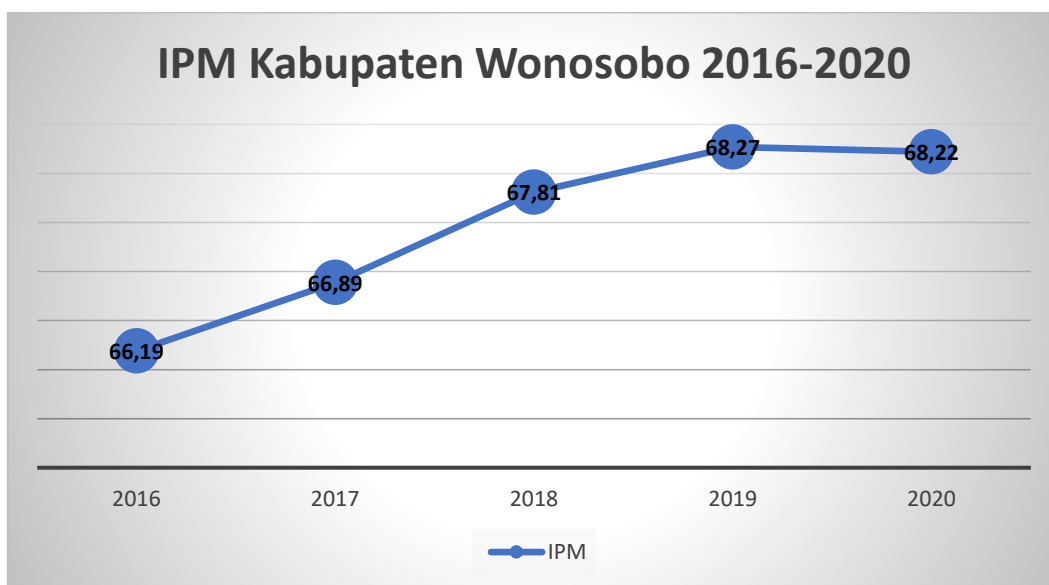
(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021)

Dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, laju inflasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 cenderung lebih tinggi daripada provinsi dan nasional, namun pada tahun 2017 laju inflasi turun menjadi 3,21 lebih rendah dibandingkan provinsi dan lebih tinggi dari nasional. Penurunan laju Inflasi di Kabupaten Wonosobo tersebut berpengaruh terhadap posisi kinerja yang lebih baik ditingkat provinsi dan nasional.

1.6 Indikator Kinerja Makro

1.6.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks ini dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan indeks komposit (gabungan) hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.



Gambar 1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016- 2020

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Perubahan nilai IPM di Kabupaten Wonosobo dari gambar diatas menunjukkan bahwa nilai dari komponen penilaian IPM terus membaik sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Komponen tersebut diantaranya Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah serta Pengeluaran perkapita Disesuaikan. Keempat komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai menuju nilai yang lebih baik pada tahun sampai tahun 2019,

seiring dengan tingkat pembangunan fisik dan non-fisik yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Nilai perkembangan nilai per komponen dalam penilaian IPM tersaji dalam Tabel I.13 yang merangkum perkembangan dari Tahun 2016-2020.

Tabel I.13.
Perkembangan IPM Wonosobo Menurut Komponen Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,16	71,3	71,46	71,60	71,82
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,67	11,68	11,69	11,74	11,75
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,12	6,51	6,75	6,76	6,81
Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)	Rp (000)	9,880	9,970	10,500	10,870	10,621
IPM	Angka	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22
Pertumbuhan IPM	%	0,49	0,7	0,92	0,46	-0,05

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021

Secara umum IPM Tahun 2020 mengalami penurunan walaupun pada beberapa komponen cenderung naik. Angka Harapan Hidup 71,82 yang memiliki arti bahwa anak yang lahir di tahun 2020 akan dapat bertahan hidup sampai umur 71-72 tahun. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah 11,75 yang memiliki arti bahwa anak berumur 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2020 memiliki harapan dapat sekolah hingga jenjang SMA (arti dari nilai 11,75).

Tabel I.14.
Komponen IPM Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo

Komposit IPM	Kabupaten Wonosobo		
	2018	2019	2020
AHH	71,46	71,60	71,82
HLS	11,69	11,74	11,75
RLS	6,75	6,76	6,81
PPP	10,5 juta	10, 87 juta	10,62 juta
IPM	67,81	68,27	68,22

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021

Berdasarkan Tabel I.14 dapat dilihat bahwa Komposit Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi AHH, HLS, dan RLS di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, sedangkan PPP dan IPM mengalami fluktuatif.

**Tabel I.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota
se-Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020**

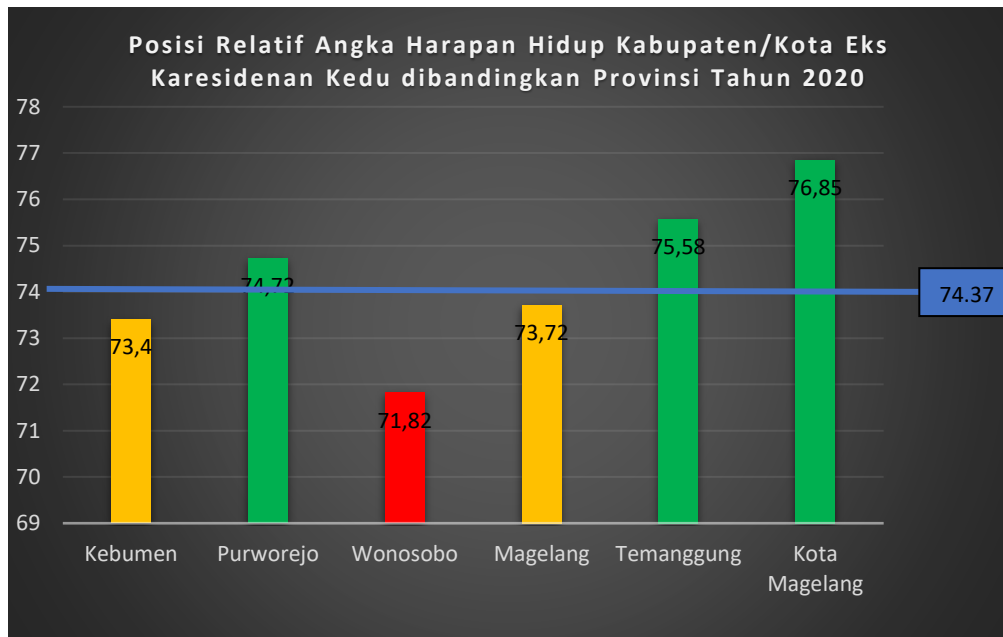
No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan IPM
1	Kabupaten Magelang	67,85	68,39	69,11	69,97	69,87	2,02
2	Kota Magelang	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99	1,83
3	Kabupaten Purworejo	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68	2,02
4	Kabupaten Temanggung	67,6	68,34	68,83	69,56	69,57	1,97
5	Kabupaten Kebumen	67,41	68,29	68,8	69,60	69,81	2,4
6	Kabupaten Wonosobo	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22	2,03
Provinsi Jawa Tengah		69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	1,89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)

Dibandingkan dengan kabupaten/ kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 berada di urutan ke 6 terendah dan jauh di bawah rata- rata IPM Provinsi Jateng. Namun demikian pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata- rata pertumbuhan provinsi.

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan dari 71,60 pada tahun 2019 menjadi 71,82 pada tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan pada tahun 2020 dapat bertahan hidup hingga usia 71-71 tahun. Pada tahun 2020 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Harapan Hidup tertinggi adalah Kota Magelang (76,85) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (71,82).

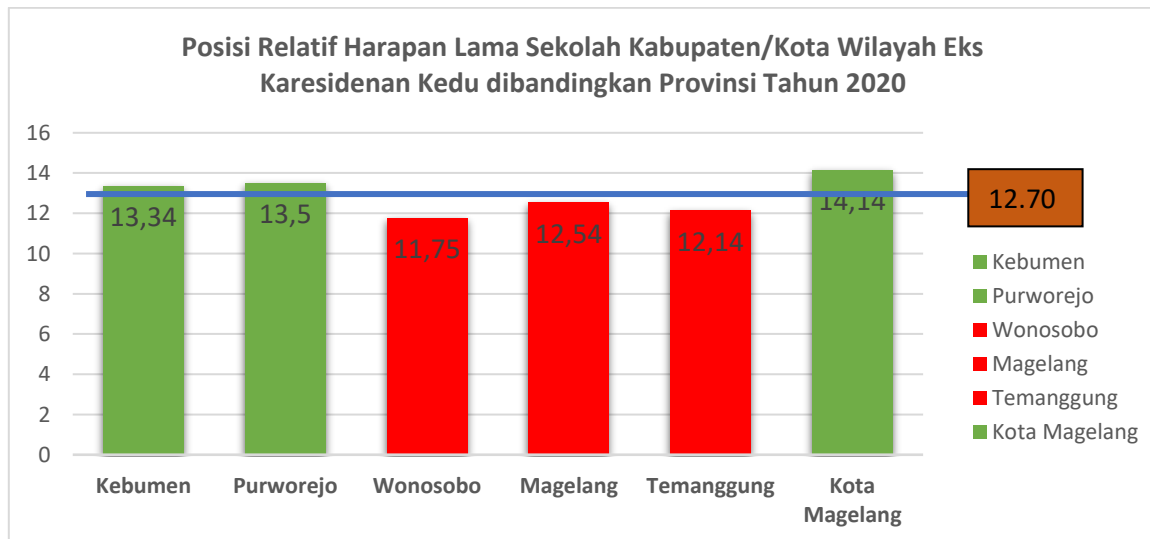


Gambar I.9. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2020)

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.



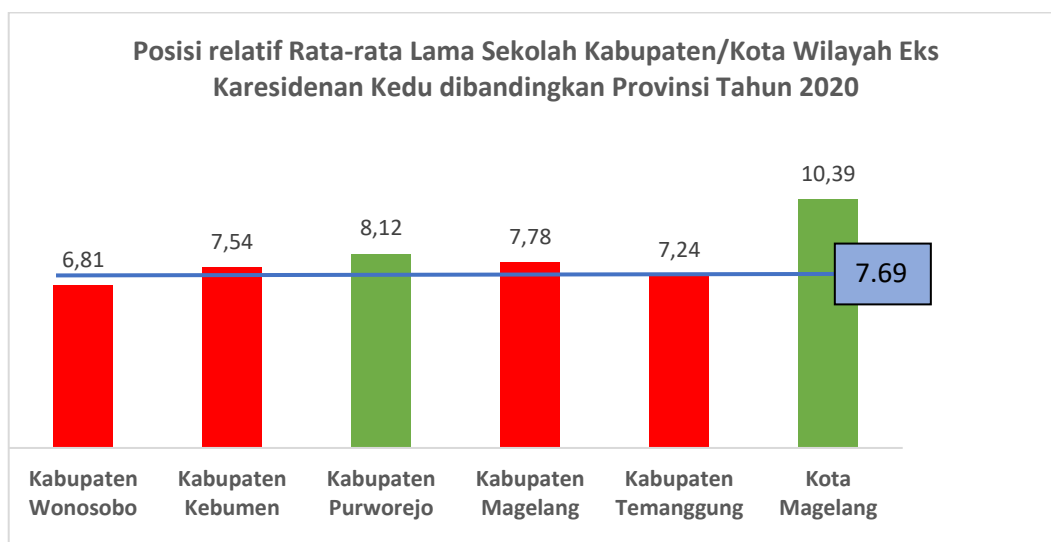
Gambar I.10. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2021)

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar 11,75 Tahun. Nilai tersebut masih dibawah nilai provinsi pada tahun 2020 sebesar 12,70 Tahun. Nilai Harapan Lama Sekolah 11,75 tahun mempunyai arti bahwa anak usia 7 tahun pada tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo hanya memiliki peluang untuk sekolah sampai ke jenjang SMA di saat anak-anak di kabupaten lain setidaknya berpeluang sekolah sampai dengan perguruan tinggi.

C. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah dari kurun waktu 2016-2020 semakin meningkat dari 6,12 tahun menjadi 6,81 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Wonosobo memiliki pendidikan tertinggi sampai kelas 1 SMP (kelas 7).



Grafik I.11. Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2021)

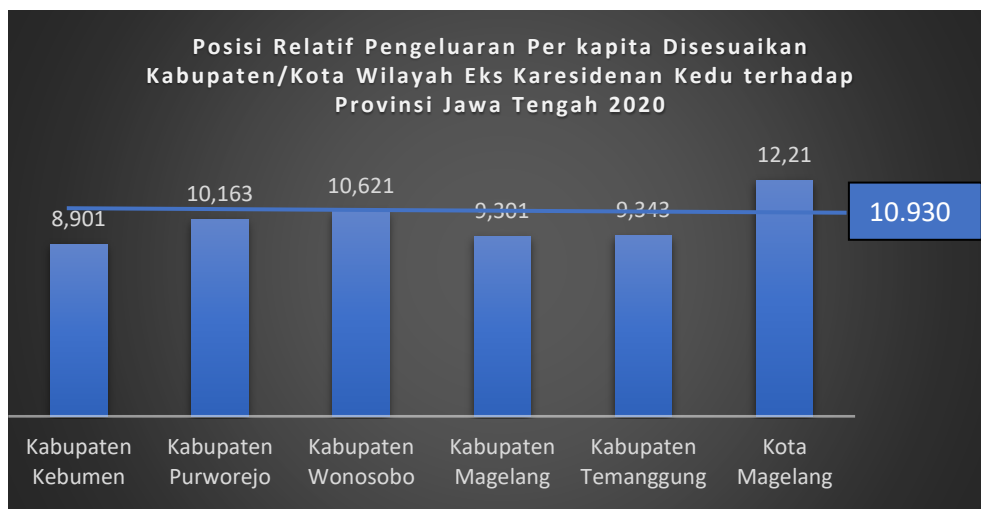
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan daerah lain di eks-Karesidenan Kedu memiliki nilai yang paling rendah. Nilai tersebut juga dibawah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Nilai rata-rata lama sekolah tertinggi di eks-Karesidenan Kedu berada di Kota Magelang dengan nilai 10,39 atau setingkat kelas 1 SMA (Kelas 10).

D. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan

Standar hidup layak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.

Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Wonosobo meningkat dari Rp9.877 juta pada tahun 2016 menjadi Rp10,87 juta pada tahun 2020. Akan tetapi angka ini menurun pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar Rp 10,62 juta. Hal tersebut tentunya disebabkan adanya dampak ekonomi selama masa pandemic Covid-19.

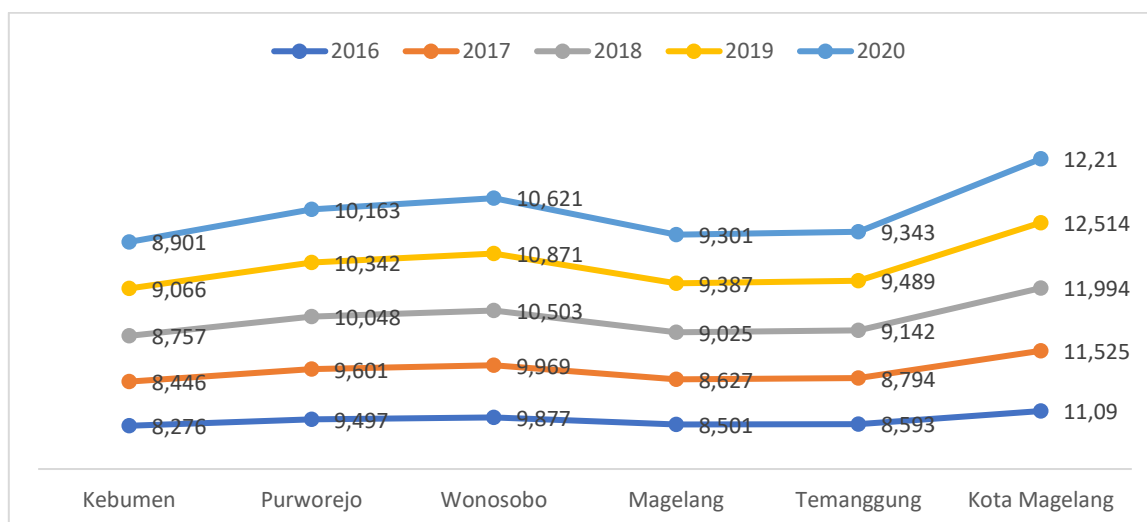
Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Wonosobo ini masih dibawah dengan Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah yang bernilai Rp10,93 juta.



Gambar I.12. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2021)

Posisi pengeluaran per kapita Kabupaten Wonosobo di Karesidenan Kedua berada di posisi ke-2 dan mendekati dengan angka rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah.



Gambar I.13. Pengeluaran Per kapita di Sesuaikan (PPP) Kabupaten/ Kota Wilayah se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2021)

1.6.2 Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

A. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin tentunya hasil dari pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Wonosobo sebanyak 160,1 ribu jiwa dan pada tahun 2020 turun hingga menjadi 137,6 ribu jiwa.



Gambar I.14. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa)

(Sumber: BPS Kab Wonosobo, 2021)

Perkembangan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonosobo jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ke 3 tertinggi, lebih rendah dari Kabupaten Kebumen dan lebih tinggi dari Kabupaten Purworejo, secara rinci dapat dilihat pada Tabel I.16.

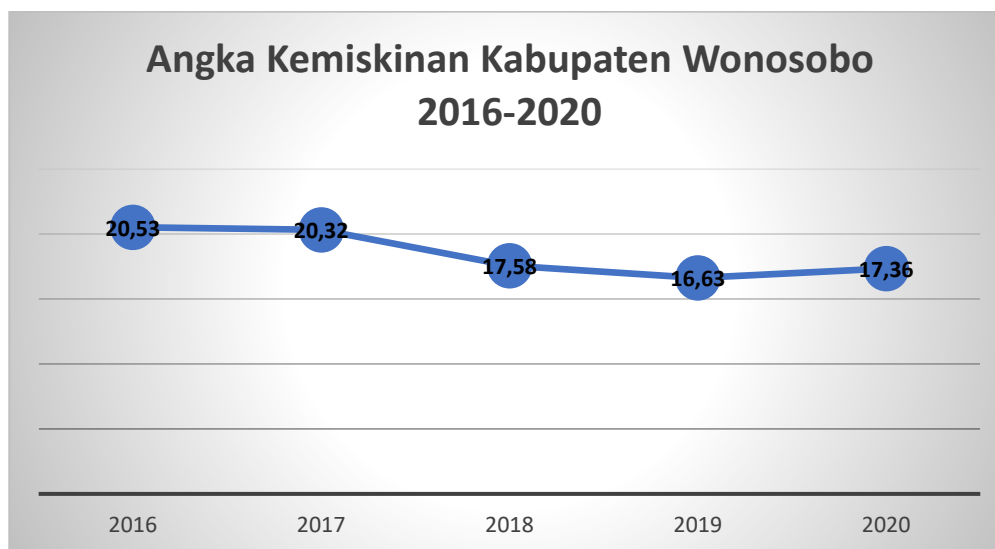
Tabel I.16. Jumlah Penduduk Miskin di Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020 (Ribuan Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Magelang	158,9	157,2	143,4	137,4	146,3
2	Kota Magelang	10,6	10,6	9,6	9,1	9,3
3	Kabupaten Purworejo	99,1	98,6	83,5	82,2	84,8
4	Kabupaten Temanggung	87,1	86,8	75,4	72,6	77,3
5	Kabupaten Kebumen	235,9	233,4	208,7	201,3	211,1
6	Kabupaten Wonosobo	160,1	159,2	138,3	131,3	137,6
Provinsi Jawa Tengah		4506,9	4450,7	3897,2	3743,23	3980,90

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

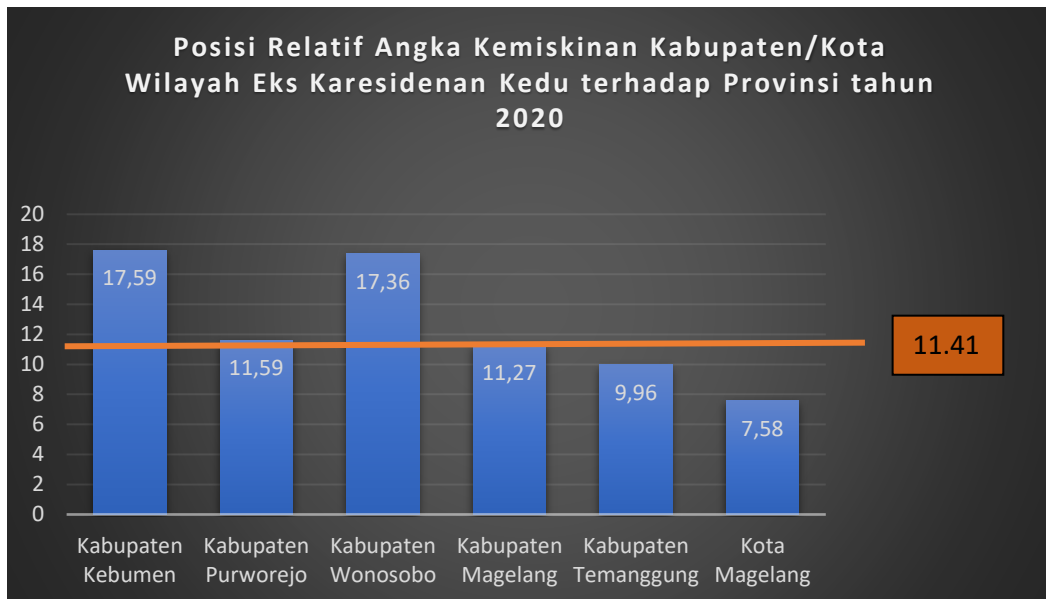
B. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Berbeda dengan Tabel I.15, Gambar I.15 menjelaskan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan angka kemiskinan yaitu dari 16,63 di tahun 2019 menjadi 17,36 di tahun 2020.



Gambar I.15. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

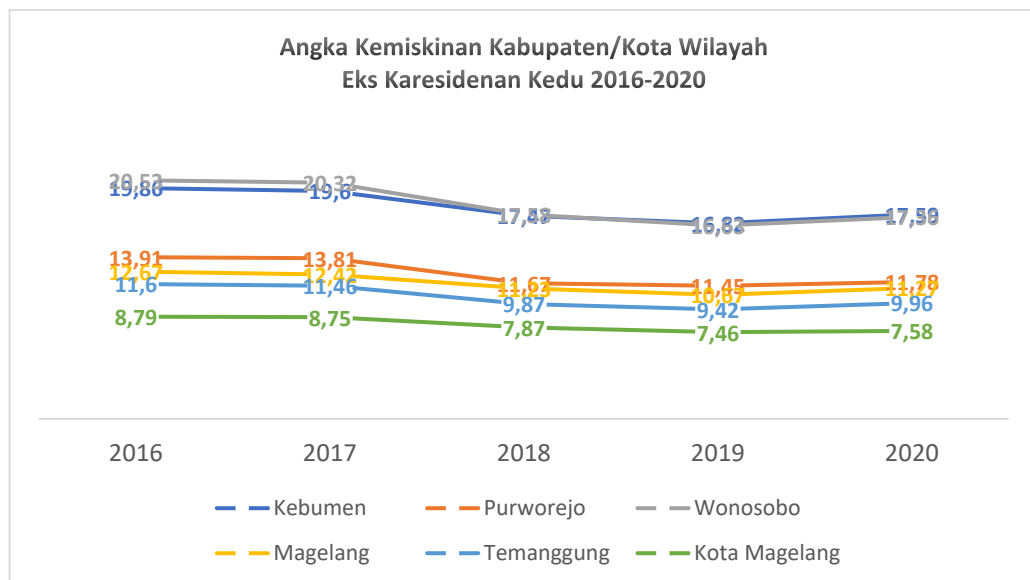
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)



Gambar I.16. Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Posisi persentase kemiskinan di eks-Karesidenan Kedu dengan melihat Gambar I.16 menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo berurutan dengan nilai 17,59% dan 17,36%. Karesidenan Kedu memiliki tiga Kabupaten yang nilai persentase kemiskinannya berada dibawah nilai persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Kab. Magelang, Kab. Temanggung dan Kota Magelang).



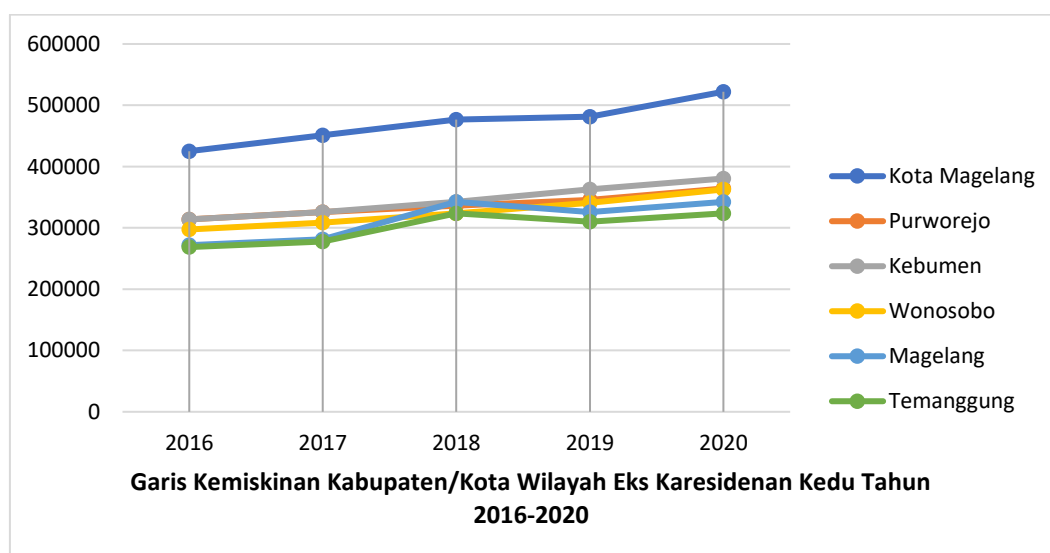
Gambar I.17. Presentase Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo cenderung menurun selama tahun 2016-2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Presentase Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo hampir sama dengan Kabupaten Kebumen dimana di setiap tahun nya dari tahun 2016-2020 berada pada angka yang tidak jauh berbeda.

C. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM terdiri dari paket komoditi kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM merupakan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan yang diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu pada periode Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar I.18



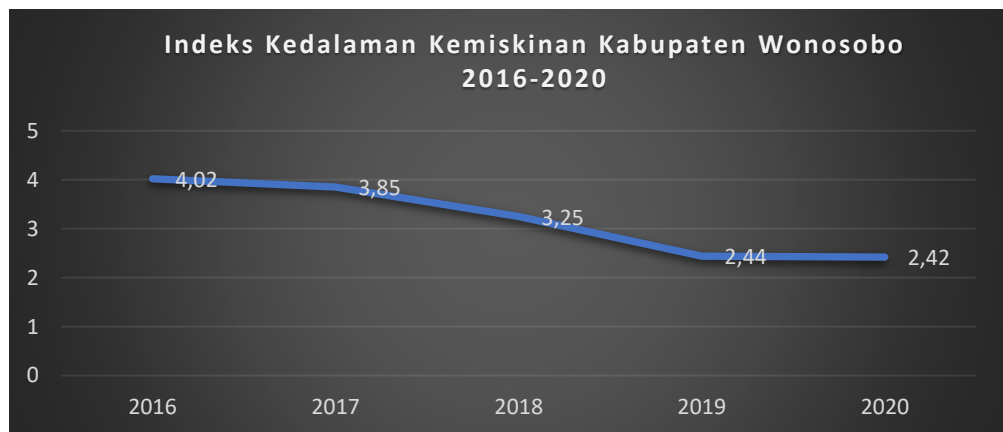
Gambar I.18. Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2019, yaitu menjadi sebesar Rp362.683. Tren garis kemiskinan selalu meningkat seiring dengan laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

D. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin.

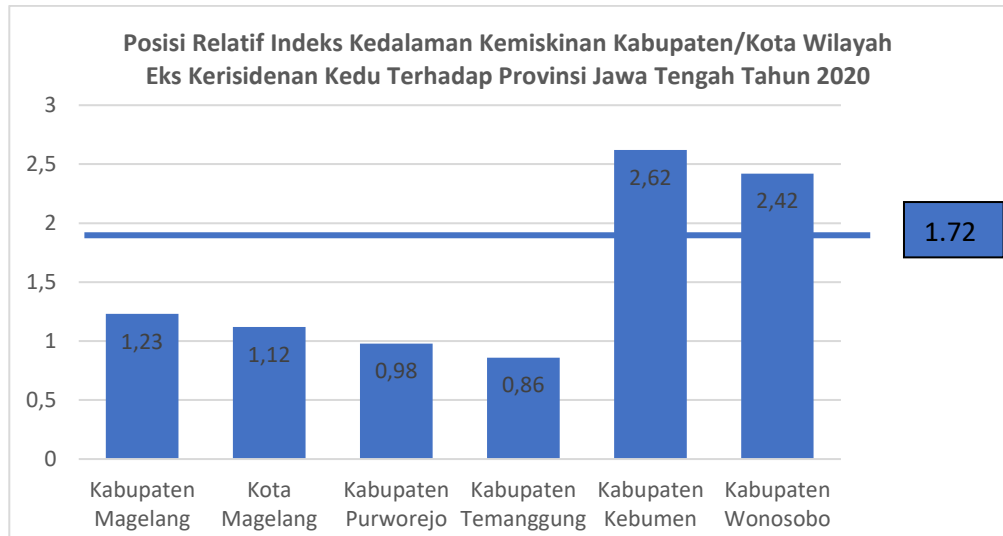


Gambar I.19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dari 4,02 pada tahun 2016 menjadi 2,42 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, gap antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih tinggi dan memerlukan usaha yang keras untuk dapat menaikkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin melampaui garis kemiskinan.

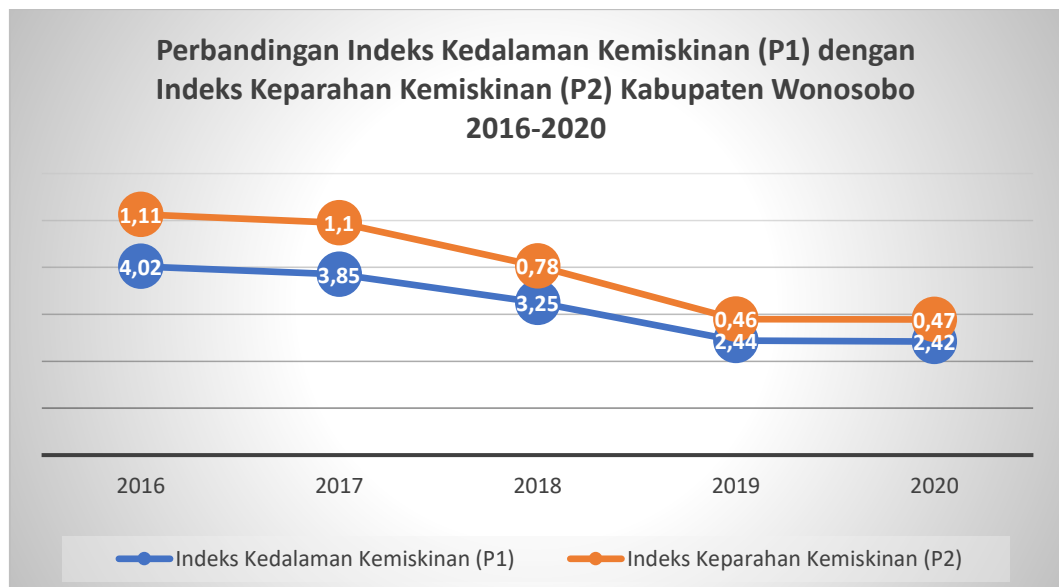
Meskipun mengalami penurunan, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 masih lebih tinggi 0,7 poin dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota eks-Karesidenan Kedu, Kabupaten Kebumen memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 2,62 dengan selisih 0,2 dibandingkan Kabupaten Wonosobo.



Gambar I.20. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021)

E. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 4,02 pada tahun 2016 menjadi 2,42 pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar I.21. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo 2016-2020

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021)

Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan selama 5 tahun terakhir relatif menurun. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mendekati angka nol yang artinya semakin rendah kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan, turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga bersamaan dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan semakin mendekatnya gap atau ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kondisi Indeks Keparahannya di eks Karesidenan Kedu dapat dilihat pada Tabel I.16 dibawah ini.

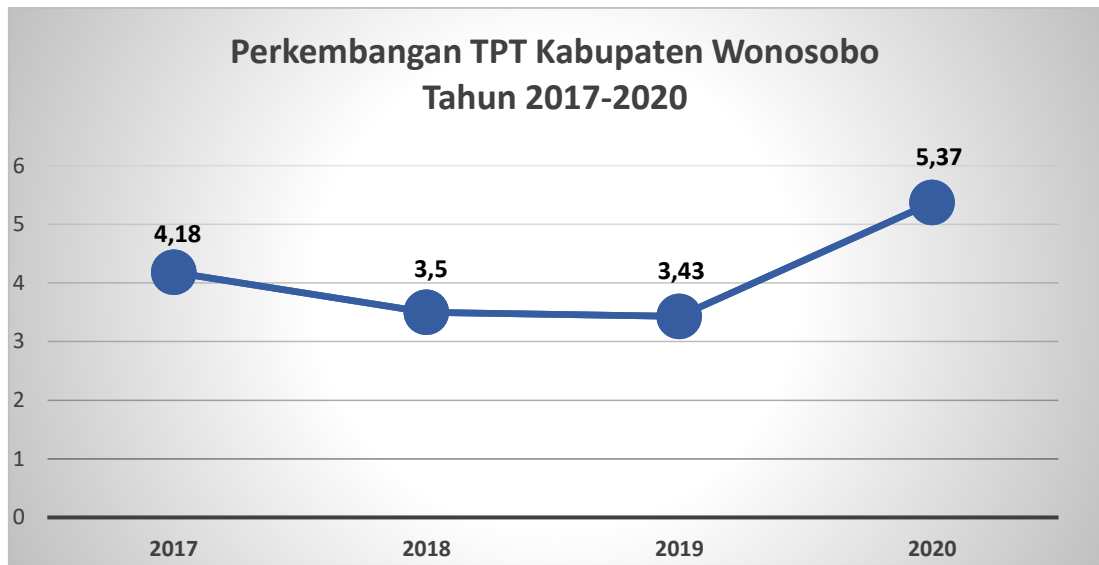
**Tabel I.17. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota
se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (dalam persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Magelang	0,44	0,31	0,34	0,17	0,20
2	Kota Magelang	0,23	0,32	0,21	0,19	0,23
3	Kabupaten Purworejo	0,76	0,54	0,36	0,1	0,12
4	Kabupaten Temanggung	0,39	0,43	0,29	0,05	0,11
5	Kabupaten Kebumen	1,11	0,99	0,55	0,65	0,55
6	Kabupaten Wonosobo	1,11	1,1	0,78	0,46	0,47
Provinsi Jawa Tengah		0,63	0,57	0,45	0,3	0,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (diolah)

1.6.3 Angka Pengangguran

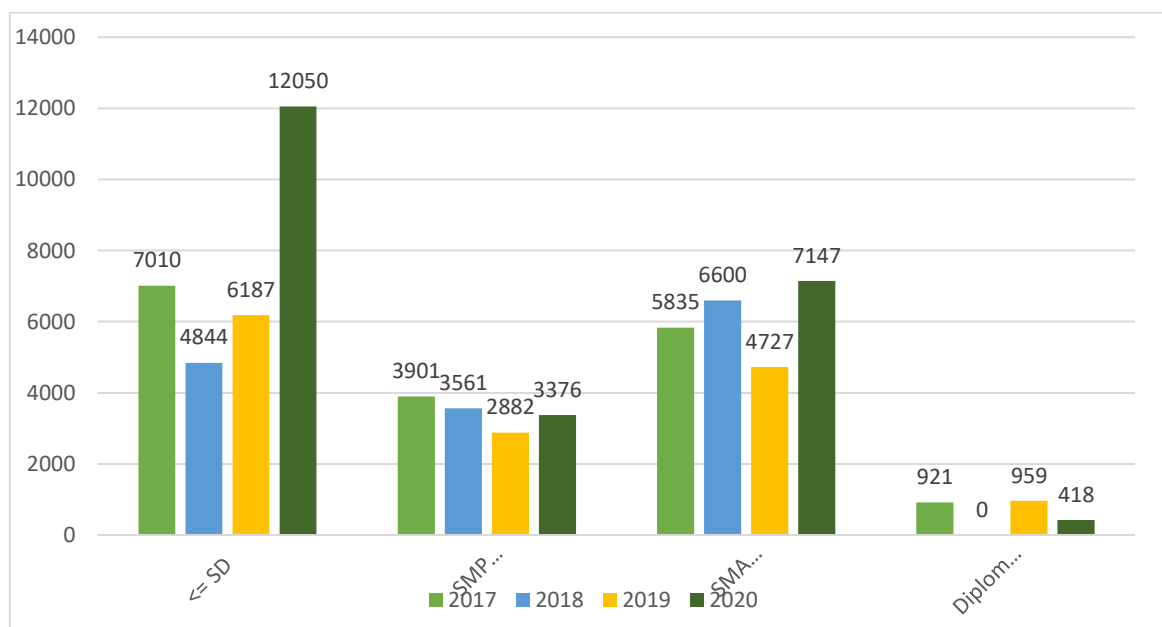
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.



Gambar I.22: Tingkat Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2020

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

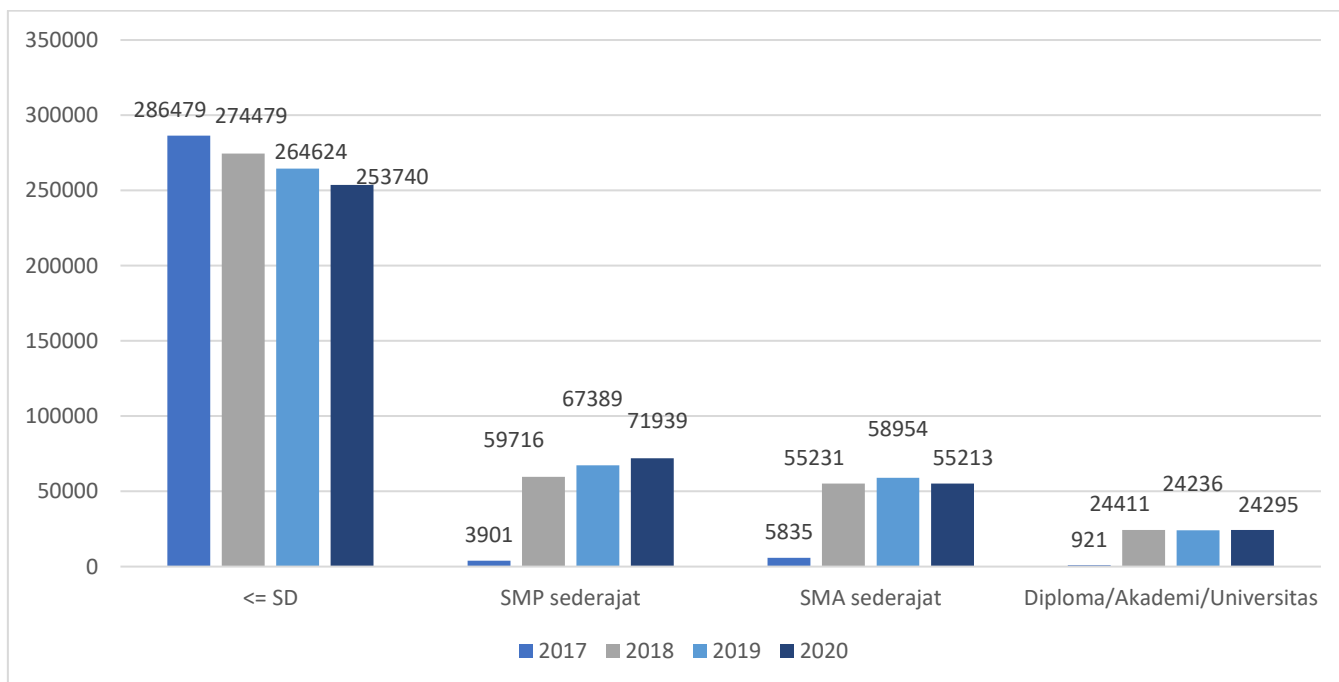
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 merupakan TPT tertinggi yang diproyeksikan memiliki nilai sebesar 5,37%. Mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Sempat mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 3,43%.



Gambar I.23: Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kab. Wonosobo Tahun 2017-2020

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo memiliki *trend* yang cenderung menurun dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2020, TPT naik sebesar 5,37 dengan dominasi penganggur pada tingkat pendidikan SD, tidak tamat SD dan bahkan belum pernah sekolah. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.



**Gambar I.24. Penduduk Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017-2020
di Kabupaten Wonosobo**

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Di tahun 2020 TPT cenderung tinggi, namun total penduduk yang bekerja, sejumlah 62,6% merupakan penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD atau sederajat, tidak tamat SD, dan bahkan tidak pernah sekolah.